

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA BARAT

Regi Saputra¹, Irwan Muslim²

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: sregi82@yahoo.com, irwanmuslim64@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal, masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yaitu masih tingginya jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang

penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM dengan mengalokasikan dana pemerintah secara strategis. Pengeluaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan daerah adalah dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. APBD di suatu daerah member ringkasan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung indeks pembangunan manusia (Maria,2021).

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur mengenai bagaimana kegiatan penelitian yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dan memahami objek-objek menjadi sasaran atau penelitian. Penelitian ini merupakan studi empiris terhadap analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat.

Jenis data dalam penelitian ini adalah time series. Dimana data ini bersumber dari lembaga atau institusi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS, Statistik Sumatera Barat dan DJPK). Selain itu diperoleh dari berbagai referensi, literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Merujuk dari hasil penelitian t statistik yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatera Barat dengan nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.093836 artinya jika Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1 persen, maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.093836 dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan hasil regresi Pertumbuhan Ekonomi berhubungan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatera Barat yang tidak sesuai hipotesis awal bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Putu Arya Finkayana dan Made Heny Urmila Dewi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Bali.

Hal ini disebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Masih banyak ditemui di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat banyak anak putus sekolah, buta huruf, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Sesuai dengan teori model pertumbuhan klasik yang mengemukakan bahwa mesin dan kemajuan ekonomi harus bertengger di atas empat roda yang sama, baik di negara miskin maupun negara kaya. Keempat faktor pertumbuhan tersebut adalah: sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk mengetahui suatu daerah

memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya dilihat dari banyaknya modal dan manusia karena perlu adanya teknologi yang memadai di suatu daerah, kemajuan teknologi dapat memudahkan pekerjaan-pekerjaan masyarakat. Kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi yang modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya terlihat dari Pertumbuhan ekonomi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat per tahun 2019-2020, semua daerah di Sumatera Barat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Paling parah pertumbuhan ekonomi di kabupaten padang pariaman turun menjadi -10.46% tahun 2020 imbas dari pandemi Covid-19, sebelum pandemik terjadi, per tahun 2018 pertumbuhannya berada di angka $5,46$ persen. Pandemi ini menyebabkan pembatasan kegiatan besar-besaran, dan pengalihan pembangunan untuk pandemi covid-19 ini, menyebabkan berbagai aspek kehidupan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM di suatu daerah justru juga mengalami penurunan. Dimana semakin rendah pendapatan masyarakat maka semakin rendah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Namun apabila pendapatan rendah maka akan lebih sulit dalam penyerapan tenaga kerja baru. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami tingkat fluktuasi. Hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat tidak merata karena hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia melainkan untuk kepentingan yang lain, misalnya infrastruktur yang dimana infrastruktur itu terdiri dari beberapa subsektor seperti perumahan dan transportasi, padahal jika pertumbuhan ekonomi mengedepankan pembangunan manusia, maka pengeluaran pemerintah akan ditujukan pada seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan indikator lainnya maka keuntungan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Aditia (2019) Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Riau.

2. Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa Kemiskinan Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatra Barat dengan nilai koefisien regresi variabel kemiskinan sebesar -1.156675 artinya jika kemiskinan naik sebesar 1 persen, maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.156675 dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena ketika kemiskinan meningkat, tidak

akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM karena kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai tolak ukur bukan hanya kekurangan dalam tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi juga tingkat kesehatan, pendidikan serta perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya. Jika disimpulkan naik turunnya kemiskinan sangat berkaitan dengan naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia.

Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam, dimana perkembangan sumberdaya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumberdaya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai atau salah guna (Todaro dan Smith, 2006).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita Dewi, 2017) yang membahas Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah

pendapatan riil minimum atau dapat dikatakan hidup dibawah kemiskinan Internasional. (Todaro dan Smith, 2006).

Penelitian ini sejalan dengan temuan Pasuloi (2020) hasil penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar. Ini dibuktikan dari hasil olah data dimana koefisien variabel kemiskinan sebesar -1,168 dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1,443 < 4,303$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,286 > 0,05$).

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatera Barat dengan nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0.246056 artinya apabila Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.246056 dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatera Barat pada alpha 5%. Tetapi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatera Barat pada alpha 10%. Hal ini dibuktikan p-value (0.0692) $< \alpha = 0.10$.

Pengeluaran pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor

pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

Penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan

tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Menurut Todaro (2011) yang mengatakan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan, dan dengan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan mudah tercapai.

Temuan ini juga sejalan dengan teori Human Capital menekankan bagaimana pendidikan meningkatkan teori produktifitas dan efisiensi pekerja dengan meningkatkan tingkat stok kognitif kemampuan pekerja manusia produktif secara ekonomi yang merupakan produk dari kemampuan bawaan dari investasi pada manusia. Penyediaan pendidikan formal dipandang sebagai investasi modal manusia yang dianggap sama atau bahkan lebih berharga dari modal fisik. (Woodhall, 2009).

Penelitian ini juga juga sejalan dengan temuan Usmadilanti (2011) dengan judul Analisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah tahun 2007-2009 bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rosnani Siregar, Hamni Fadilah Nasution dan Siti Fatimah (2018), dengan hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, ketidakefisienan pengalokasian dana akan mengakibatkan

tidak tercapainya pembangunan bidang pendidikan.

Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Namun, ketidakmerataan pembangunan bidang pendidikan akan menyebabkan ketimpangan pada pendidikan, dimana penduduk daerah perkotaan akan lebih banyak akses dan pilihan pendidikan dibandingkan dengan daerah pedesaan yang masih sangat minim fasilitas pendidikan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Usmadilanti (2011) dengan judul Analisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah tahun 2007-2009 bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Sumatra Barat dengan nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0.626282 artinya apabila Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia sebesar 0.626282 dengan asumsi variabel lain tetap.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jehuda Jean Sanny Mongan (2019) yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa Persentase belanja pemerintah pusat bidang pendidikan dari PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM terhadap pertumbuhan IPM di Indonesia. Temuan ini tidak sejalan dengan temuan Usmadilanti (2011) yang menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM

Penelitian ini sejalan dengan temuan Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013).

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya (ucheci Shirley anaduaka,2014) modal dan total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan menghasilkan tingkat yang lebih tinggi kemudian menunjukkan bahwa hubungan positif dengan tingkat output jumlah yang lebih besar dari masing masing akan menimbulkan tingkat peningkatan output atau kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Becker dalam Saputri (2014: 25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam human capital adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan

hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.

Penelitian ini juga sejalan dengan Todaro (2003) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan Kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga tentunya. Karena Tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Khusnul Chotimah (2017) yang menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat
2. Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat
3. Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat
4. Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat
5. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat

- Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Persepektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2017. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019 M
- Agung, W. (2010). “pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Tesis prodi magister ekonomi FEUI.
- Astri, Meylina. (2013). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2012. ISSN:2302-2663
- Badan Pusat Statistik (2020). Produk Domestic Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik(2020). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
- Badan Pusat Statistik(2020). Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Adelfina dan Jember, I Made. (2016),“ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.Vol.5.No.10 Oktober 2016. ISSN:2303-0178.
- Adi Widodo, W. &. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi jawa tengah.
- Aditia, Rahayu Nia. 2019. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan